



Asosiasi
Media Siber
Indonesia



Google News Initiative

POLICY BRIEF

**Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi
Penanganan Isu Sara dan Hoaks Melalui
Pengembangan Program Cek Fakta di
Samarinda, Kalimantan Timur**

Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Penanganan Isu Sara dan Hoaks Melalui Pengembangan Program Cek Fakta di Samarinda, Kalimantan Timur

Oleh:
Sri Astuty, Universitas Lambung Mangkurat
sri_astuty@ulm.ac.id

Abstrak: Policy brief ini disusun berdasarkan riset yang telah dilakukan di wilayah Samarinda Kalimantan Timur pada tahun 2023. Policy brief ini melihat pada pentingnya sinergi dan kolaborasi pelbagai pihak dalam menangani pelbagai ragam misinformasi dan disinformasi yang terjadi pada lokalitas di Kalimantan Timur. Policy brief ini sebagai bahan pertimbangan untuk pemangku kepentingan KPU, Bawaslu, organisasi media, pemerintah, dan masyarakat di Kalimantan Timur. Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan ragam hoaks lainnya menjadi isu sentral di Kalimantan Timur yang turut serta menjadi pemicu kerawanan Pemilu sebagaimana pemetaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Bawaslu. Kolaborasi dalam penanganan isu SARA dan hoaks tidak dapat dilakukan secara parsial, membutuhkan perencanaan dan komitmen seluruh pihak terutama berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi. Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur secara umum dapat dipicu oleh hal yang berkaitan dengan persoalan etnis dan agama. Selain itu persoalan hoaks, politik uang (money politic), dan juga dinamika politik lokal serta politik identitas juga turut menjadi faktor penentu kerawanan lainnya. Penanganan isu SARA dan hoaks membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensi dengan memperhatikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kalimantan Timur. Dominasi Suku Banjar, Dayak, dan Bugis dengan keragaman agama yang dianut yaitu Islam dan Kristen memerlukan tingkat toleransi dan penghargaan yang tinggi atas perbedaan yang dimiliki tersebut. Hal ini tercermin bahwa kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur masih sangat terjaga dengan baik, tidak terdapat gesekan-gesekan, namun demikian apabila tidak dirawat dari akar rumput secara masif, maka gesekan-gesekan kecil ini dapat menjadi pemicu pergolakan baik ringan maupun berat. Selain itu, isu hoaks kesehatan berkaitan dengan HIV/AIDS dan hoaks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur juga perlu untuk mendapat catatan. Persoalan isu kesehatan dan kebijakan pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal ini perlu penanganan dengan meningkatkan pemahaman bersama termasuk peningkatan kemampuan literasi digital terutama kompetensi digital culture melalui program edukasi maupun program pelatihan cek fakta untuk masyarakat dan seluruh pihak terkait di Kalimantan Timur.

Latar Belakang

Data Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang didasarkan pada pengalaman pemilu sebelumnya menempatkan posisi Kalimantan Timur termasuk sebagai daerah 4 besar dengan kategori rawan tinggi dengan skor 77,04. Daerah dengan kategori rawan tinggi lainnya yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara dengan skor 87,48, dan Jawa Barat dengan skor 77,04. Terdapat variasi kerawanan pemilu di Kalimantan Timur dilihat dari dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu berpotensi munculnya misinformasi dan disinformasi. Hal ini sebagaimana Pemetaan kerawanan Pemilu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di antaranya: 1) Peretasan (*hacking*) atau serangan siber; 2) Sengketa dan konflik antarpertai atau antarcalon peserta pemilu; 3) Intimidasi dan ancaman terhadap anggota KPU; 4) Gangguan keamanan logistik pemilu; 5) Gangguan terhadap keamanan fisik kantor KPU dari potensi terjadinya tindakan sabotase atau penyerangan; 6) Penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan keadilan pemilihan umum; 7) Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemilihan dan/atau penetapan hasil pemilihan yang dianggap tidak adil, dan 8) Ancaman dari aksi terorisme terorganisir yang menghendaki situasi *chaos* (kekacauan).

Menilik pengalaman Pemilu 2019, kampanye hitam dan hoaks menjadi catatan dalam perjalanan misinformasi dan disinformasi penyelenggaraan Pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu 2024 menunjukkan kampanye melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian pada tingkat provinsi mencapai 50%, kampanye yang mengandung hoaks sebesar 30% dan kampanye yang bermuatan isu SARA sebesar 20% dengan provinsi yang tingkat kerawanan tertinggi DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Namun, pada tingkat kabupaten/kota potensi kerawanan meliputi kampanye bermuatan hoaks mencapai 40%, kampanye ujaran kebencian 33%, dan kampanye mengandung SARA sebesar 27%. Terdapat 15 provinsi yang tertinggi tingkat kerawanan isu kampanye media sosial berdasarkan angka agregasi kabupaten/kota meliputi Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Terdapat beberapa kasus hoaks yang menerpa wilayah Kalimantan Timur di antaranya beredar melalui Whatsapp bahwa pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur merupakan program PKI pada tahun 1955. Hoaks ini merupakan hoaks lama yang kembali beredar di masyarakat. Faktanya adalah pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur merupakan program pemerintah yang telah melalui analisis dan pertimbangan dengan melihat beban di Jakarta dan kondisi wilayah. Isu hoaks kesehatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS

juga turut mendominasi.

Berdasarkan hasil FGD yang diselenggarakan Tim Program Cek Fakta dalam 2 sesi pada tanggal 8 September 2023 diikuti oleh 26 peserta dari berbagai unsur (KPU Kaltim, Bawaslu Kaltim, akademisi, AMSI, AJI, Kelompok Keagamaan, dan lainnya) data observasi, dan penelusuran pustaka untuk wilayah Kalimantan Timur beberapa persoalan dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Hoaks masih banyak ditemukan pada berbagai platform Media Sosial, salah satunya aplikasi *Whatsapp* baik yang diterima secara personal maupun dalam *Whatsapp group*.
2. Isu hoaks, SARA, politik uang (*money politic*), politik identitas, dan dinamika politik lokal seperti hoaks politik (pencurian kotak suara di Balikpapan, pemilu, capres sempat membuat kisruh keadaan) menjadi catatan penting untuk dilakukan penanganan preventif maupun refresif.
3. Isu hoaks kesehatan (anak pengidap HIV/AIDS ditelanlarkan keluarga), hoaks vaksin, hoaks Covid-19, hingga hoaks joki jual beli darah pada PMI.
4. Terdapat ragam hoaks krusial lainnya di antaranya hoaks tentang etnis China (benturan etnis) berupa video untuk memecah belah, hoaks keagamaan (menyerang minoritas), hoaks berita duka, hoaks informasi pekerjaan, hoaks pembangunan IKN, hoaks Suku Dayak usir rencana pembangunan IKN, hoaks pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Program PKI Tahun 1955, hoaks penutupan jalan trans Kalimantan, hoaks kebencanaan, dan hoaks kerusuhan etnis.
5. Cek fakta atas isu-isu lokal belum tersedia dan kemampuan cek fakta yang dimiliki masyarakat masih lemah, sehingga isu-isu hoaks dan SARA mudah menyebar.
6. Penggunaan pelbagai platform media dalam mengkonter hoaks dan menyebarluaskan hasil cek fakta belum tersedia dan belum banyak digunakan.
7. Kegiatan penanganan hoaks masih dilakukan secara parsial, masih belum banyak pihak yang terlibat secara kolaboratif.
8. Adanya media *online* lokal yang mengedepankan kecepatan, sehingga rentan terjadi kesalahan informasi yang disampaikan.

Antisipasi kerawanan atas isu hoaks dan SARA ini membutuhkan strategi dan langkah-langkah kebijakan kolaboratif untuk dapat ditangani secara komprehensif. Potensi atas kerawanan yang telah dipetakan oleh pihak kepolisian maupun Bawaslu dapat menjadi tolok ukur oleh pihak-pihak terkait dalam kerangka menyiapkan formula dan model dalam menyikapi kerawanan isu-isu tersebut, dan *policy brief* ini memberikan catatan solusi terhadap persoalan tersebut.

Deskripsi Permasalahan

Data lembaga penelitian Nielsen 2023 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia setiap hari menghabiskan waktu berselancar di internet menggunakan komputer selama 4 jam 42 menit, *browsing* di telepon genggam selama 3 jam 33 menit dan menghabiskan waktu di media sosial selama 2 jam 51 menit. Hal yang sama ditunjukkan berdasarkan data *We are Social* tahun 2023 pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta atau 77% dari total populasi penduduk dan sebanyak 167 juta atau 60,4% adalah pengguna media sosial aktif. Hal ini juga menunjukkan potensi pengguna media sosial di Kalimantan Timur.

Posisi indeks literasi digital wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data *survei.literasidigital.id* (2022) mencapai 3,62 lebih tinggi 0,08 daripada rerata indeks literasi digital secara nasional sebesar 3,54. Angka indeks literasi digital yang diperoleh ini menempatkan Kalimantan Timur dalam tiga besar provinsi dengan indeks tertinggi. Masing-masing indikator indeks melebih rerata indeks nasional meliputi Digital Skill dengan indeks 3,55 (Nasional 3,52), Digital Ethics dengan indeks 3,90 (Nasional 3,68), Digital Safety dengan indeks 3,17 (Nasional 3,12), dan Digital Culture 3,86 (Nasional 3,84). Angka indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu masuk dalam kriteria provinsi dengan angka indeks tertinggi dan selalu berada di atas rerata nasional. Namun potensi hoaks masih tetap ada, sehingga kemampuan literasi digital dan cek fakta atas isu-isu tersebut di atas (hoaks lama yang didesain ulang, penggunaan teknologi untuk produksi hoaks, dan penyebarluhan hoaks yang lebih cepat ketimbang konternya) menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan sebagai langkah kebijakan selanjutnya dengan strategi dan formula yang tepat.

Pernyataan Masalah

Dari temuan di atas persoalan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang berkaitan dengan isu SARA, pemilu dan politik serta isu hoaks kesehatan masih menjadi hal yang perlu diwaspadai, kelemahan terbesar masih belum banyak pihak dan platform media yang dilibatkan secara masif dan kolaboratif dalam melakukan kegiatan cek dan ricek/ verifikasi informasi terutama secara lokalitas.

Alternatif Kebijakan

Beberapa hal yang dapat menjadi alternatif bagi pemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

- Untuk kegiatan edukasi literasi digital berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Timur

agar berkolaborasi dengan Mafindo termasuk riset pemetaan kerawanan isu hoaks dan lainnya;

- Untuk tindakan preventif dengan melakukan pengawasan partisipatif (verifikasi dan cek fakta) penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada agar melibatkan Mafindo di wilayah Kalimantan Timur.

2. KPU Provinsi Kalimantan Timur

- Untuk kegiatan edukasi literasi digital berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Timur agar berkolaborasi dengan Mafindo;
- Kolaborasi dengan Mafindo untuk riset-riset literasi digital penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terutama berkaitan dengan riset-riset motif hoaks.

3. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

- Kesiapan masyarakat dalam memahami hoaks ini memerlukan dengan upaya-upaya kebijakan yang terus-menerus dilakukan secara masif dan komprehensif yang dapat disiapkan dalam bentuk salah satunya melalui kurikulum literasi digital sesuai jenjang pendidikan;
- Masih banyak wilayah-wilayah di Kalimantan Timur yang belum terhubung dengan jaringan internet, sehingga upaya penanganan hoaks ke wilayah-wilayah yang belum dijangkau;
- Penanganan hoaks di Indonesia dalam perkembangan saat ini terus berkembang. Berbagai pihak turut mengambil bagian dalam upaya meminimalisir persoalan hoaks. Sektor media dan komunitas bergerak bersama dalam melakukan berbagai program untuk melakukan edukasi dan melakukan kegiatan cek fakta, namun sifat kegiatan masih general dan nasional. Dibutuhkan tindakan kolaboratif yang dapat menjangkau seluruh daerah dan segmentasi masyarakat terutama anak, perempuan, difabel, lansia, dan masyarakat terpencil;
- Sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dapat disinergikan antarlembaga (Program Bakesahan, Program Hantam Hoaks, Program Sosialisasi dan Edukasi Hoaks, *Trustworthy* Berita AMSI/Model Pendekatan Kontekstual) dan terus ditingkatkan sebagai bentuk kolaborasi multipihak untuk mengantisipasi misinformasi dan disinformasi kepemiluan dan lainnya. Hal ini tentu membutuhkan komitmen bersama baik persoalan edukasi, sosialisasi sampai dengan pengelolaan konten-konten negatif di media sosial. Dan Mafindo memiliki perwakilan di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan Timur, sehingga kerja sama kolaboratif untuk edukasi juga dapat melibatkan Mafindo wilayah;

- Terkhusus untuk kasus HIV/AIDS dibutuhkan kebijakan penguatan dan pengembangan literasi kesehatan secara massif ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur.

4. Organisasi Media (Dewan Pers, PWI, AJI, AMSI, IJTI)

- Membutuhkan aktor-aktor lokal dalam hal ini jurnalis media lokal dalam melakukan kegiatan cek fakta lokal dengan memanfaatkan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terpadu termasuk dengan Mafindo Wilayah Kalimantan Timur;
- Penguatan media-media lokal untuk turut serta terlibat dalam kegiatan cek fakta serta penyebarluasan hasil cek fakta serta melakukan pengembangan *platform* cek fakta di media masing-masing dan berkontribusi aktif dalam melakukan kegiatan cek fakta dan menyebarluaskan melalui berbagai platform yang dimiliki dan melibatkan media lokal.

5. Organisasi/Komunitas Literasi Digital (Mafindo, CekFakta.com)

- Kolaborasi dalam Program Edukasi dan Cek Fakta dengan melibatkan unsur mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya dengan menjangkau seluruh wilayah di Kalimantan Timur;
- Mafindo melakukan pengembangan berbagai riset literasi digital seperti riset motif-motif hoaks bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu;
- Pengembangan program-program seperti kegiatan-kegiatan kelas Tular Nalar, Kelas Cek Fakta, Kelas Prebunking, Kampanye Prebunking, dan program kegiatan literasi digital lainnya dilakukan juga secara kolaboratif dan masif dengan jangkauan seluruh wilayah di Indonesia terutama daerah-daerah pelosok di Kalimantan Timur dengan pelibatan tokoh agama, adat, dan masyarakat sebagai *opinion leader* daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan di Samarinda Kalimantan Timur baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kepolisian, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPSS), Pihak Organisasi Media (Dewan Pers, PWI, AJI, AMSI, IJTI), pegiat literasi digital dan komunitas-komunitas (Mafindo, CekFakta.com, dan lainnya) berdasarkan peta data sebagai berikut:

1. Penekanan pada edukasi untuk tidak meneruskan hoaks dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi secara intens. Selain itu edukasi sejak dini melalui pengembangan kurikulum pendidikan pada semua

- jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi dengan pola-pola yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimaksud;
2. Penguatan komunitas-komunitas jaringan sosial dan kelompok agama (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) untuk meredam persoalan hoaks. Hal ini menjadi penting mengingat apabila seseorang/kelompok masyarakat terus-menerus diterpa hoaks, terdapat kemungkinan informasi hoaks menjadi informasi yang mengandung nilai kebenaran, karena itu perlu disikapi dengan langkah-langkah kebijakan yang dapat mengakomodir penguatan pengetahuan literasi digital dan posisi pada komunitas dan tokoh dimaksud sebagai *opinion leader* dan Mafindo dapat menjadi rujukan sebagai pelaksana kegiatan tersebut;
 3. Penguatan posisi komunitas yang bergerak dalam edukasi, advokasi, dan kampanye literasi digital dengan program cek fakta bersama Mafindo, AJI, dan AMSI;
 4. Penguatan media lokal untuk berperan dalam penanganan hoaks khususnya media mainstream baik televisi, radio, dan radio komunitas dan media *online* lokal untuk dapat menjangkau khalayak dalam penyebarluasan edukasi literasi digital secara berkelanjutan serta dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya dalam menyajikan berita secara independen, netralitas, akurat dan berimbang. *Trustworthy* yang menjadi program kerja AMSI ini dapat menjadi model dalam upaya *self regulation* atau swa-regulasi media dalam memproduksi berita untuk kepentingan publik, dengan desain indikator *trustworthy* sebagai gabungan *brand safety* dan kode etik jurnalistik Dewan Pers serta menjadikan komponen literasi digital (cek fakta) bagi wartawan dalam uji kompetensi wartawan;
 5. Penguatan kemampuan literasi digital para *influencer* dalam aktivitas kampanye pemilu untuk membawa pesan pemilu yang damai.

Kesimpulan

Semua elemen masyarakat dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk terlibat aktif menciptakan suasana Pemilu 2024 yang damai, aman, dan demokratis di Kalimantan Timur dengan kemampuan meminimalisir penyebaran arus hoaks dan isu SARA melalui peningkatan skill verifikasi informasi dengan pelatihan program cek fakta, pengembangan berbagai program-program literasi digital yang menyentuh seluruh segmentasi masyarakat, pemanfaatan dan penguatan berbagai platform media lokal untuk penyebaran hasil cek fakta ke kanal-kanal media. Kolaboratif terus disinergikan dalam penanganan ragam isu-isu hoaks terutama menggandeng para *opinion leader* di Kalimantan Timur.

Referensi/Rujukan

- AMSI (2023, Desember 21). Diskusi Publik Tentang Indikator Trusworthy News Kolaborasi Tangkal Hoax Jelang Pemilu 2024. <https://www.amsi.or.id/diskusi-publik-tentang-indikator-trustworthy-news-kolaborasi-tangkal-hoax-jelang-pemilu-2024/>
- Arumanto (2023, November 20) Diskominfo Kaltim Ajak Masyarakat Perangi Hoaks. <https://kaltim.antaranews.com/berita/201345/diskominfo-kaltim-ajak-masyarakat-perangi-hoaks>
- Kiah. (2023, November 12). Jahidin Ajak Masyarakat Waspada Isu Sara dan Hoaks. <https://beritakaltim.co/2023/11/12/jahidin-ajak-masyarakat-waspada-isu-sara-dan-hoaks/>
- Bawaslu (2023, November 8). Waspada Kampanye Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Sosial <https://www.prindonesia.co/detail/3551/Bawaslu-Waspada-Kampanye-Ujaran-Kebencian-dan-Hoaks-di-Media-Sosial>
- Bawaslu (2023). Indeks Kerawanan Pemilu 2024. <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%20IKP%20PEMILU%20DAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%202024-2.pdf>
- Fairoussaniy, M. (2022, Maret 16). Bawaslu Kaltim Perketat Media Antisipasi Hoaks Kampanye Jelang Pemilu 2024. <https://kaltim.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kaltim-perketat-media-sosial-antisipasi-hoaks-kampanye-jelang-pemilu-2024>
- Kominfo. (2022, Januari 20). Hoaks Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur Program PKI tahun 1955 https://www.kominfo.go.id/content/detail/39507/hoaks-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur-program-pki-tahun-1955/0/laporan_isu_hoaks
- Kominfo (2019, Oktober 18). Disinformasi Kerusuhan Antara Suku Dayak dan Bugis. https://www.kominfo.go.id/content/detail/22241/disinformasi-kerusuhan-antara-suku-dayak-dan-bugis/0/laporan_isu_hoaks
- Prabawati. (2023, Desember 20). AMSI Ajak Media Tangkal Hoax Jelang Pemilu 2024. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/amsi-ajak-media-tangkal-hoax-jelang-pemilu-2024>
- Rahayu, R. (2024, Januari 12). Intimidasi Hingga Hoaks Pemilu Disinyalir Rawan di Kota Bontang. <https://rri.co.id/pemilu/513917/intimidasi-hingga-hoaks-pemilu-disinyalir-rawan-di-kota-bontang>
- Rohmah, K. (2023, Juni 12). Bantu Lawan Hoaks Faisal Apresiasi Kehadiran Mafindo Kaltim. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/anti-hoax/bantu-lawan-hoaks-faisal-apresiasi-kehadiran-mafindo-kaltim>
- Rohmah, K. (2023, Oktober 12). Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu Kemenkopolhukam lakukan rapat koordinasi di Kaltim. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/politik/antisipasi-hoaks-jelang-pemilu-kemenkopolhukam-lakukan-rapat-koordinasi-di-kaltim>

